BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kabupaten Bandung Barat adalah kabupaten baru Provinsi Jawa Barat, Indonesia yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bandung. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang di sebelah barat dan utara, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi di sebelah timur, serta Kabupaten Cianjur di sebelah barat dan timur. Kabupaten Bandung Barat mewarisi sekitar 1,5 juta penduduk dari 42,9% wilayah lama Kabupaten Bandung.

Tuntutan pemekaran wilayah Kabupaten Bandung, dilihat dari kondisi geografisnya oleh beberapa kalangan dinilai dapat dipahami sebab wilayah Kabupaten Bandung cukup luas (2.324.84 km2) dengan letak wilayah mengelilingi Kota Bandung dan Kota Cimahi. Disamping itu, jumlah penduduknya cukup banyak, berdasarkan SUPAS (Survei Penduduk Antar Sensus) 2002 sebanyak 4.300.000 jiwa.

Pejabat Sementara Bupati Bandung Barat Dr.H. Tjatja Kuswara Drs., M.Si selesai menjalankan tugasnya pada tanggal 17 Juli 2008. Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat pertama Drs. H. Abubakar, M.Si dan Drs. Ernawan Natasaputra, M.Si hasil pemilihan umum dilantik pada tanggal 17 Juli 2008 oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atas nama presiden.

Menurut Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 BAB XIV Tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Nasional ayat 1 menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaaan. Melihat dari ayat undang – undang Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, ayat itu merupakan dasar dari pembuatan Undang – Undang Koperasi di Indonesia mengingat Koperasi dibentuk berdasarkan asas kekeluargaan.

Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bagian ketiga tentang Urusan Pemerintah Konkuren pasal 12 ayat 2 huruf g menyebutkan bahwa Urusan Pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah pemberdayaan masyarakat dan desa. Ini menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu elemen penting dalam memajukan masyarakat demi mewujudkan salah satu tujuan bangsa Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Menurut Moh. Ali Aziz dkk (2005:136) Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses di mana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus-menerus, proses partisipatif di mana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi, pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses.

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa

> "bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi".

Melihat dari penjelasan Undang – Undang diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi adalah menjadi badan usaha mandiri yang menjadi naungan anggota dan menjadikan masyarakat yang maju, adil dan makmur serta berlandaskan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan berasas kekeluargaan.

Pemberdayaan yang sering menjadi andalan pemerintah salah satunya yaitu mendirikan sebuah koperasi, Koperasi sangat penting untuk meningkatkan usaha – usaha kecil dan menengah yang dapat meningkatkan perekonomian di suatu daerah. Koperasi merupakan badan usaha yang mempunyai fungsi untuk mengembangkan potensi anggotanya dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. koperasi mempunyai peran yang penting untuk meningkatkan perokonomian masyarakat, contohnya dengan koperasi masyarakat mampu membuat usaha – usaha sesuai keahlian dan bidangnya untuk mendapatkan penghasilan. Dengan demikian perekonomian di daerah tersebut akan meningkat.

Menurut Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat Aos Kausar dikutip dari *jabar.pojoksatu.id* mengatakan, 60 persen koperasi yang masih bertahan adalah koperasi simpan pinjam.

> ”Saat ini, rata-rata koperasi yang masih bertahan bergerak di bidang simpan pinjam yang mencapai 60 persen. Sementara, koperasi lainnya rata-rata tidak mampu bertahan sehingga memilih untuk berhenti,” ungkapnya. (http://jabar.pojoksatu.id/bandung/2017/01/21/jumlah-koperasi-di-kabupaten-bandung-barat-terus-menyusut/)

Berdasarkan kutipan diatas beliau menjelaskan bahwa rata – rata koperasi yang masih bertahan adalah Koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam. Sementara Koperasi jenis lainnya tidak mampu bertahan dan memilih berhenti beroperasi. jumlah Koperasi yang masih bertahan di Kabupaten Bandung Barat dari total 811 koperasi di Kabupaten Bandung Barat, kata dia, tinggal 600 koperasi yang masih aktif dan rata – rata adalah koperasi jenis simpan pinjam. Pemerintah daerah terus mendorong seperti memberikan pelatihan dan pembinaan agar koperasi yang masih aktif ini dapat terus berkembang.

> ”Justru yang tinggi koperasi simpan pinjam, namun koperasi di bidang lainnya banyak yang berhenti. Contoh KUD, dulu penjual pupuk rata-rata dipegang oleh KUD tapi sekarang sudah tidak, dan sekarang KUD banyak yang kolap, pergeseran kebijakan pusat juga berpengaruh,” ungkapnya. (http://jabar.pojoksatu.id/bandung/2017/01/21/jumlah-koperasi-di-kabupaten-bandung-barat-terus-menyusut/)

Beliau menambahkan bahwa keterampilan, modal dan pemasaran masih menjadi kendala di antara sejumlah koperasi yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Banyak koperasi yang telah lama eksis, namun terkendala oleh persoalan sumber daya manusia, modal dan pemasaran.

Minimnya keberadaan menjadi salah satu penyebab hadirnya rentenir yang ada di Kabupaten Bandung Barat, dikutip dari *bandung.pojoksatu.co.id* Bupati Kabupaten Bandung Barat Drs.H Abu Bakar,M.Si mengatakan bahwa peran koperasi sangat efektif dan dibutuhkan untuk meminimalisir pertumbuhan rentenir.

Bupati Kabupaten Bandung Barat juga menerangkan bahwa melalui gerakan koperasi juga bisa mendongkrak kualitas Indeks Prestasi Manusia (IPM), karena bisa lebih memberdayakan masyarakat lebih baik lagi. Selain itu, dengan menjadi anggota koperasi, masyarakat juga bisa mendapatkan dukungan dan fasilitas serta kemudahan dalam pemberdayaan perekonomian.

Menurut Data Koperasi Tahun 2016 yang peneliti peroleh dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat ada 893 Koperasi yang terdaftar ada 463 yang aktif dan ada 430 Koperasi yang tidak aktif di Kabupaten Bandung Barat. jumlah Koperasi yang tidak aktif disini terbilang cukup banyak dan hampir menyamai jumlah Koperasi yang aktif. peran pemerintah disini dibutuhkan oleh koperasi itu sendiri dan juga anggotanya, untuk memberdayakan koperasi yang ada, mengingat salah satu fungsi pemerintahan yaitu fungsi pemberdayaan, diharapkan pemerintah bisa memberikan pelatihan – pelatihan yang berguna untuk koperasi atau khususnya anggota koperasi tersebut.

Peran pemerintah dalam pemberdayaan koperasi di Kabupaten Bandung Barat menurut peneliti sangat penting, karena koperasi bisa mensejahterakan anggota dan masyarakat Kabupaten Bandung Barat contohnya yaitu anggota koperasi bisa membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari yang modalnya berasal dari koperasi tersebut serta membuka lapangan kerja baru. oleh sebab itu peran koperasi cukup penting untuk memajukan perekonomian Kabupaten Bandung Barat, karena dengan semakin meningkatnya eksistensi Koperasi di Kabupaten Bandung Barat, semakin besar kemungkinan perekonomian di Kabupaten Bandung Barat meningkat pula mengingat Kabupaten Bandung Barat

merupakan salah satu tempat wisata yang mempunyai potensi yang cukup bagus untuk meningkatkan produk – produk daerah yang hasilnya akan mensejahterakan daerah.

Penelitian ini menyampaikan Pemberdayaan Koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam memberdayakan Koperasi guna meningkatkan efektivtias Koperasi di Kabupaten Bandung Barat. Sebagai pemandu agar fokus meneliti sesuai dengan fakta di lapangan penelitian tersebut mengenai pemberdayaan Koperasi di Kabupaten Bandung Barat, peneliti mengambil pengurus – pengurus Koperasi di Kabupaten Bandung Barat sebagai informan untuk penelitian ini dan juga aparatur Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat.

Penelitian yang dilakukan Yehezkiel Hasudungan program studi administrasi negara Universitas Indonesia tahun 2013 yang berjudul Pemberdayaan Koperasi dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Masyarakat oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif positivist yaitu pendekatan yang menekankan pada penjelasan konsep dasar yang kemudian dipergunakan sebagai sarana analisis.

Teori yang digunakan oleh penelitian tersebut adalah tahap pengembangan (Pemberdayaan) masyarakat (Adi,2002:182) diantaranya : Tahap Persiapan (*Engagement)*, Tahap Pengkajian (*Assesment)*, Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan (*Designing)*, Tahap Formulasi Rencana Aksi,Tahap Pelaksanaan Program atau Kegiatan (Implementasi), Tahap Evaluasi dan Tahap Terminasi. Hasil dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa kurangnya

pengetahuan terkait tugas dan fungsi sebagai pengurus atau anggota koperasi di Kota Tangerang selatan dan juga masalah dan koperasi masih kekurangan modal untuk memenuhi kebutuhan anggotanya.

Persamaan dan perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian ini adalah penelitian diatas sama – sama meneliti koperasi sebagai objek penelitian. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus kepada pemberdayaan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas Koperasi di Kabupaten Bandung Barat dibanding dengan langkah – langkahnya selain itu teori yang digunakan oleh penelitian sebelumnya juga berbeda dengan teori yang digunakan pada penelitian ini.

Berdasarkan dari uraian latar belakang penelitian diatas maka guna mengetahui dan memberikan solusi terkait masalah di atas maka peneliti memberi judul **Pemberdayaan Masyarakat Oleh Dinas Koperasi dan UMKM (DKUKM) Guna Meningkatkan Efektivitas Koperasi di Kabupaten Bandung Barat**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disajikan dalam latar belakang masalah di atas, untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, maka peneliti merumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dilihat melalui pendekatan Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan

Pemeliharaan Guna meningkatkan eksistensi Koperasi di Kabupaten Bandung Barat?"

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Suatu penelitian pasti terdapat suatu maksud dan tujuan Penelitian, maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengkaji lebih dalam tentang pemberdayaan Koperasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Bandung Barat, dengan tujuan berikut :

1. Untuk mengetahui Pemungkinan guna menciptakan suasana yang kondusif dalam meningkatkan eksistensi Koperasi di Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk mengetahui Penguatan oleh Dinas Koperasi dan UMKM guna memperkuat pengetahuan pengurus Koperasi di Kabupaten Bandung Barat.
3. Untuk mengetahui Perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM kepada Koperasi di Kabupaten Bandung Barat.
4. Untuk mengetahui Penyokongan oleh Dinas Koperasi dan UMKM guna meningkatkan efektivitas Koperasi di Kabupaten Bandung Barat.
5. Untuk mengetahui Pemeliharaan oleh Dinas Koperasi dan UMKM guna menjaga keselarasan lingkungan perkoperasian di Kabupaten Bandung Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Sesuatu yang dikerjakan tentunya mempunyai maksud, tujuan dan juga diharapkan dapat membawa manfaat baik khususnya bagi diri peneliti sendiri maupun masyarakat luas, adapun kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Bagi Peneliti, semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi peneliti sendiri untuk terus melakukan penelitian-penelitian yang lain mengenai pemberdayaan Koperasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bandung Barat.
2. Secara teoritis, semoga hasil penelitian ini bisa menambah sumber kajian Ilmu Pemerintahan khususnya terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan dapat menjadi sumber jurnal untuk dijadikan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Secara praktis, peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan bagi koperasi produksi di Kabupaten Bandung Barat, dan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan koperasi produksi di Kabupaten Bandung Barat.